

Judul : Golkar Tunggu KPK Soal Azis
Tanggal : Rabu, 28 April 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Golkar Tunggu KPK Soal Azis

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Partai Golkar masih menunggu kepastian hukum terkait kasus yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin. Nama Azis ikut disebut dalam kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, M Syahril. Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menegaskan, pihaknya tidak ingin ada spekulasi apa pun terkait terseretnya nama Azis.

Hatta mengaku pihaknya masih menunggu kepastian hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita tidak perlu banyak berkomentar kemudian berspekulasi, juga kita harus mengedepankan dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah," ujar Hatta saat dihubungi, Selasa (27/4).

Ia menjelaskan, Dewan Etik Partai Golkar tidak bisa tiba-tiba menggelar sidang etik sebelum adanya kepastian hukum. Pihaknya menegaskan, tetap menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin. Nama Azis yang saat ini menjabat sebagai wakil

ketua DPR disebut bertemu dengan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju di rumah dinas untuk membahas kasus yang menjerat Syahril.

"Apa saja yang kita lihat ini mengarah kepada kemungkinan pelanggaran etik? Itu kita tidak bisa istilahnya kemudian melakukan spekulasi begitu," kata Hatta menegaskan. Sementara, hingga Selasa (27/4), Azis Syamsuddin sendiri belum bisa dimintai keterangan terkait namanya yang muncul dalam kasus ini. Selain Azis, pengurus DPP maupun Fraksi Golkar di DPR juga belum memberi respons.

Azis sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas kasus ini. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI) melaporkan Azis ke MKD atas dugaan keterlibatan dalam perkara suap penyidik KPK dengan Wali Kota Tanjungbalai.

"Terkait dengan dia memfasilitasi pertemuan antara Syahril dengan penyidik KPK itu. *Kan* di KPK itu ada peraturan internal di mana penyidik dan pegawai itu tidak boleh *ketemu*

dengan pihak yang akan diperiksa atau pihak yang terlibat," ujar Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho.

Sementara, Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengaku, pihaknya telah menerima laporan dari LP3HI terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Pihaknya saat ini tengah memeriksa kelengkapan aduan tersebut. "Saat ini petugas sekretariat MKD sedang memeriksa kelengkapan syarat syarat formil aduan tersebut dan pengadu memiliki waktu untuk melengkapi semua persyaratan dalam waktu 14 hari," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (27/4).

Politikus Partai Gerindra ini mengklaim MKD belum dapat memproses semua laporan aduan yang masuk. Pasalnya, DPR masih menjalani masa reses hingga 5 Mei mendatang. "Reses baru berakhir tanggal 6 Mei mendatang dan seluruh anggota MKD sedang berada di dapil masing-masing untuk melayani konstituennya. Setelah masuk masa sidang mendatang baru kami bisa melakukan rapat-rapat internal," ujar Habiburokhman. ■ **ed:** agus raharjo